

RANCANG BANGUN HULU HILIR, PEMODELAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA AGRIBISNIS KEDELAI

Soetriono

Dosen Fakultas Pertanian Universitas Jember

irtusss@yahoo.com & irtusss@gmail.com

081330512502

ABSTRACT

Soybean commodity plays an important role in economy since most of the commodities (95%) are used for agro-industry and 96% of them is raw materials for tofu and tempe agro-industry. Domestic production has not been able to fulfill internal need of it, where 55% is still fulfilled by import. This research is intended to identify the competitiveness of on farm agribusiness of soybean by institutional input and policy simulation; the relation between upstream and downstream system activities of soybean agribusiness; model and strategy to eliminating soybean farmers' powerlessness

The research area was determined purposively in East Jawa Jember considering that Paleran Village was a village that had Prime Farm program and Curah Lele village was the centre village of soybean marked with Prime Farm program. Samples were taken by applying by simple random sampling.

Analysis method by using competitive and comparative advantages (competitiveness) applied Policy Analysis Matrix (PAM), policy scenario, modeling and strategy to eliminating soybean farmers' powerlessness by Force Field Analysis (FFA); the research results showed:

- 1. Private profitability and social profitability of on-farm agribusiness of soybean in research area had efficiency and comparative and competitive advantages, meaning that on-farm agribusiness of soybean had competitiveness.*
- 2. Government policy toward output tradable provided negative effect on on-farm agribusiness of soybean indicated by NPCO value lower than one. Government policy toward input tradable gave positive effect on on-farm agribusiness of soybean performed by NPCI value lower than one. Collectively, government policy on input output tradable and input non tradable affected negatively on on-farm agribusiness of soybean shown by negative NPT and SRP values and PC value lower than one.*
- 3. The change of government policy toward import tariff of soybean and exchange rate of rupiah still remained giving positive effects on efficiency and competitiveness of soybean on-farm agribusiness, while the change of government policy on output tradable affected negatively on on-farm agribusiness of soybean. The change of government policy on input tradable still provided positive effects on on-farm agribusiness of soybean. The change of government in input output tradable and input non tradable remained negative, while the effect of the change of government policy on input and output tradable gave positive effects together on on-farm agribusiness.*
- 4. On-farm agribusiness of soybean under Prime Farm Program had stronger competitiveness compared to non-prime farm program though held in central area..*
- 5. In order to overcome powerlessness of soybean farmers, some efforts on the basis of FFA analysis from upstream to downstream sub-systems are necessarily undertaken, they are:*
 - a. Sub-system of up-stream agribusiness; (1) to intensify extension on the field of knowledge and technology; (2) the best quality seeds development and (3) improvement on distribution channel of production tools.*
 - b. Sub-system of on-farm agribusiness; organic fertilizer development and intensive supervision by related departments (Agriculture Department), especially on pest and disease control.*

- c. *Sub-system of down-stream agribusiness; it is necessary to establish farmer's association, soybean industry and to develop modern processing technology such as ketchup and soybean milk.*
- d. *Sub-system of marketing is needed to organize market that is related to major agribusiness market.*
- e. *Sub-system of supporting services; it is important to develop market at village level, to establish agribusiness and to optimize extension personnel that all become strong requirements.*

Kata kunci: soybean agribusiness, policy

Pendahuluan

Penelitian bidang ekonomi pertanian terkait dengan petani pangan umumnya atau kedelai khususnya, sebelumnya hanya melihat aspek-aspek tertentu yang sifatnya parsial. Misalnya, hanya terkait dengan aspek usahatani, pemasaran atau kelembagaan secara terpisah sehingga tidak didapatkan gambaran secara utuh dan berkelanjutan. Dalam penelitian ini akan dikaji secara menyeluruh sistem agribisnis kedelai mulai dari subsistem usahatani, agroindustri, pemasaran, kelembagaan, kebijakan, keberadaan pasar domestik maupun pasar internasional.

Penelitian ini didasari oleh kondisi bahwa Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sampai sekarang sekitar 65 persen penduduk menggantungkan hidup dari sektor pertanian atau mempunyai mata pencaharian sebagai petani, akan tetapi nasib petani dari hari ke hari kian tidak menentu. Tingkat kesejahteraannya tidak membaik seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang semestinya dinikmati bersama. Posisi tawar mereka lemah sehingga masalah yang dihadapi ibarat sebuah lingkaran yang tak berujung pangkal. Kebijakan pemerintah sudah banyak dilakukan namun belum mengena sasaran, belum *powerful*, dan belum intensif. Akibatnya, nilai tukar produk pertanian termasuk pangan tetap rendah. Peningkatan pendapatan di sektor pertanian pun termasuk paling lambat. Penelitian ini akan mengkaji upaya bagaimana petani kedelai dapat bangkit dari ketidakmampuannya dalam berusahatani dilihat dari peningkatan pendapatannya. Kebijakan dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang pertanian (harga minimum, harga maksimum, subsidi) seolah selalu menempatkan pertanian pada posisi yang diperhatikan, namun dalam kenyataan

membuktikan bahwa pertanian menjadi sektor yang inferior dalam pengembangannya. Dampak faktor internal (dalam negeri) ditunjang faktor eksternal (liberalisasi perdagangan) adalah pada keterpurukan pertanian yang pada gilirannya menurunkan kesejahteraan petani.

Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa liberalisasi perdagangan dapat berdampak menguntungkan atau merugikan suatu negara. Perjanjian perdagangan pada masa yang akan datang menjadi tantangan eksternal bagi keberadaan petani kedelai di Indonesia. Melalui penelitian ini akan berusaha mengungkap secara menyeluruh (tidak hanya pengaruh faktor eksternal), mulai subsistem usahatani, agroindustri, pemasaran, kelembagaan sampai pemodelan matematis yang menjelaskan hubungan perilaku variabel-variabel dalam pasar domestik maupun internasional. Informasi lengkap aspek-aspek tersebut merupakan masukan guna menyusun strategi pengentasan keterpurukan petani kedelai di Indonesia. Sedangkan obyek penelitian adalah petani yang berusahatani kedelai di wilayah sentra dan dipilih di daerah sample sentral produksi di Kabupaten Jember dengan sistem Primatani dan tradisional ditinjau dari segi kelembagaannya.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Paleran dan Desa Curahlele, Kabupaten Jember yang dikenal sebagai daerah sentra produksi kedelai di Kabupaten Jember. Penentuan daerah penelitian ini dilakukan secara sengaja atau *purposive*. Dasar pertimbangan dilakukannya penelitian di daerah tersebut karena Desa Paleran merupakan desa yang melaksanakan program Primatani, dan Desa Curahlele

merupakan desa sentra kedelai yang tidak ada program Primatani. Pengambilan contoh petani dilakukan dengan teknik penarikan contoh acak sederhana sebanyak 80 responden (petani) yang terdiri dari 40 responden di Desa Paleran dan 40 responden di Desa Curahlele, serta tiap desa terdiri dari 8 kelompok tani, sehingga tiap kelompok tani terdiri dari 5 responden. Alat analisis dengan menggunakan *Policy Analysis Matrix* (PAM) dengan beberapa skenario dan

Medan Kekuatan (*Force Field Analysis*), seperti yang dijelaskan dibawah ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Daya Saing

Hasil analisis daya saing dapat dilihat pada Tabel 1, dimana dua wilayah sampel yaitu Desa Paleran Kecamatan Balung merupakan pengetrap awal dari Program Primatani untuk komoditas kedelai di Jawa Timur, sedangkan Desa Curah Lele Kecamatan Gumuk Mas merupakan wilayah sentra komoditas kedelai.

Tabel 1. Biaya Sumberdaya Domestik per Kg Output (Privat dan Sosial) dan Daya Saing (Keunggulan Komparatif dan Kompetitif) Agribisnis Kedelai di Wilayah sentra dan Pengetrap Program Primatani

No	Tahun	Koefisien Daya Saing	Desa Paleran (Primatani)	Desa Curah Lele (Sentra Produksi)
1	2008	BSD Privat (PCR)	6.862 (0,741)	7.029 (0,759)
		BSD Sosial (DRC)	6.265 (0,672)	6.432 (0,690)
2	2009	BSD Privat (PCR)	6.042 (0,574)	7.095 (0,674)
		BSD Sosial (DRC)	5.071 (0,438)	5.927 (0,512)

Catatan : Tahun 2008 NTR Rp. 9.261,- ; SER Rp. 9.323,-

Tahun 2009 NTR Rp.10.527,- ; SER Rp. 11.578,-

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa dari dua tahun terakhir (2008 dan 2009) dapat disimpulkan ada perkembangan daya saing baik di wilayah sentra maupun wilayah Primatani. Namun demikian daya saing yang tercermin pada keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif untuk wilayah Primatani lebih berdaya saing dibandingkan wilayah sentra produksi. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari koefisien BSD sosial (BSD) dan BSD Privat (PCR), yaitu untuk Primatani mempunyai keunggulan komparatif lebih bagus (0,438 dan 0,574) dibandingkan dengan wilayah sentra sebesar 0,512 dan 0,674. Namun apabila dikaitkan dengan industri hilirnya yang berupa agroindustri tahu dan tempe maka daya saingnya akan lebih menguat yaitu antara 0,34 - 0,39 untuk agroindustri tempe dan 0,55 - 0,59 untuk agroindustri tahu pada tahun 2008.

Dari kondisi ini diketahui keuntungan yang diperoleh petani dan pengrajin agroindustri kedelai (tempe dan tahu) secara individual layak untuk diusahakan dan mampu bersaing baik secara domestik maupun secara internasional. Hal tersebut didukung oleh pendapat Simatupang (1990), Rusastra (1992), Hermanto (1993) dan

Rosegrant, et al (1997), Soetrisno (2006) yang menyatakan bahwa Jawa Timur khususnya di daerah sentra produksi kedelai (Banyuwangi, Jember dan Pasuruan) memiliki harapan besar dalam kelayakan ekonomis baik untuk pemenuhan kebutuhan lokal, antar daerah maupun ekspor. Kenyataan ini tidak terlepas dari dukungan lingkungan yang kondusif seperti kondisi tanah dan iklim yang sesuai, disamping tatalaksana pengairan yang terkelola secara baik.

Sejalan dengan hasil analisis daya saing, pengusaha agribisnis kedelai (usahatani, industri tahu dan tempe) mempunyai daya saing antara 0,3 – 0,6 yang berarti agribisnis kedelai untuk menghasilkan nilai tambah satu satuan (1 US \$) diperlukan 30 persen sampai dengan 60 persen pengorbanan sumberdaya domestik, oleh karena itu penghematan devisa yang dapat dihemat untuk usaha agribisnis kedelai pada tahun 2009 berkisar Rp. 7.368,- sampai dengan 4.210,- persatuan output untuk daya saing dengan nilai tukar resmi rupiah. Apabila pada nilai tukar bayangan (seharusnya) maka penghematan devisa akan lebih besar

berkisar Rp. 8.104,- sampai dengan Rp. 4.631,- persatu satuan produk.

B. Dampak Kebijakan Pemerintah

Selanjutnya untuk melihat dampak kebijakan pemerintah pada kebijakan output dilakukan dengan analisis PAM dengan *Nominal Protection Coefficient on Output* (NPCO). Nilai NPCO ini menunjukkan nilai dampak insentif dari kebijakan pemerintah sehingga terjadi perbedaan nilai output yang diukur melalui harga privat dan harga sosial. Nilai NPCO juga merupakan indikasi dari transfer output. Pada Tabel 3, nilai NPCO pada wilayah sentra sebesar 0,908 yang berarti bahwa 9,2 persen harga output dalam negeri lebih murah dari harga internasional, sehingga relatif sedikit dampak positif dari kebijakan pemerintah. Kebijakan protektif yang seharusnya diterapkan pemerintah (harga dasar yang sesuai dengan pasar internasional) tidak dilakukan, yang mengakibatkan pendapatan dari usahatani kedelai semakin rendah, sehingga secara sosial pendapatan petani dirugikan, dilain pihak konsumen atau agroindustri tempe tahu diuntungkan dengan harga bahan baku yang lebih rendah dari yang seharusnya. Sedangkan untuk wilayah Primatani mempunyai koefisien kurang

bagus dibandingkan dengan wilayah sentra, yaitu sebesar 0,920 yang mempunyai makna 8 persen harga output dalam negeri lebih murah dibandingkan dengan pasar internasional.

Untuk mengetahui adanya dampak kebijakan pemerintah atau dampak campur tangan pemerintah terhadap petani dan untuk melihat seberapa besar subsidi yang diberikan pemerintah baik langsung atau tidak langsung pada usahatani kedelai digunakan *Nominal Protection Coefficient on Input* (NPCI). Koefisien NPCI wilayah sentra sebesar 0,880 yang berarti bahwa petani kedelai membeli input tradable 12 persen lebih murah, sedangkan pada wilayah Primatani 5,2 persen lebih murah dari harga sosialnya, hal ini merupakan bentuk proteksi harga input yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas kedelai. Dengan adanya proteksi harga input seperti pupuk dan pestisida, diharapkan pengeluaran biaya produksi dapat ditekan sehingga akan meningkatkan pendapatan petani secara privat dan sosial. Dari koefisien tersebut kebijakan pemerintah memberikan dampak yang lebih besar terhadap wilayah sentra dibandingkan dengan wilayah Primatani.

Tabel 2 Hasil Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Usahatani Kedelai di Wilayah Primatani dan Sentra Produksi Tahun 2008.

Rasio	Wilayah Primatani		Wilayah Sentra
	Nilai		
PCR [C/(A-B)]	0.574		0.674
DRC[G/(E-F)]	0.438		0.512
NPCO [A/E]	0.920		0.908
NPCI [B/F]	0.948		0.880
EPC [(A-B)/(E-F)]	0.918		0.910
PC [D/H]	0.696		0.608
SRP [L/E]	-0.159		-0.175

Sumber : data primer, diolah 2009

Analisis selanjutnya adalah kebijakan proteksi efektif yang digunakan untuk mengetahui dampak dari seluruh kebijakan pemerintah dan mekanisme pasar input output, apakah memberikan insentif atau tidak pada usahatani kedelai dengan menggunakan model analisis *Effective Protection Coefficient* (EPC). Jika nilai EPC lebih besar dari satu, maka pemerintah telah

memberikan insentif atau perlindungan terhadap petani kedelai untuk mengembangkan usahatannya. Selanjutnya jika nilai EPC lebih kecil dari satu, maka kebijakan pemerintah tersebut menimbulkan hambatan terhadap pengembangan usahatani kedelai. Berdasarkan pada hasil analisis PAM, ternyata nilai EPC usahatani di wilayah sentra sebesar 0,910 yang berarti bahwa

dampak kebijakan pemerintah dalam pembentukan harga dan mekanisme pasar komoditi kedelai tidak memberikan insentif atau perlindungan pada petani kedelai. Hal ini ditunjukkan dengan nilai EPC kurang dari satu, sehingga nilai tambah yang dinikmati oleh petani lebih kecil dari nilai tambah sosialnya, demikian juga pada wilayah Primatani yang mempunyai nilai koefisien sebesar 0,918. Nilai ini hampir sama dengan wilayah sentra, yang berarti proteksi terhadap harga input dan output oleh pemerintah masih dirasakan kurang dapat mendukung perkembangan usahatani kedelai, dikarenakan harga input output ditingkat domestik lebih mahal dibandingkan dengan harga yang seharusnya (harga internasional).

Berdasarkan pada hasil analisis PAM, nilai Profit Coefficient (PC) adalah 0,608 yang berarti bahwa keuntungan privat petani lebih rendah dari keuntungan sosialnya, sehingga kebijakan pemerintah yang sedang berjalan tidak mampu memberikan nilai tambah keuntungan pada petani kedelai. Sebagai contoh kebijakan subsidi pupuk, pada saatnya pupuk dibutuhkan ternyata pupuk langka dan mahal harganya, dilain pihak petani tidak dapat menikmati keuntungan yang lebih dari hasil panennya karena harga kedelai rendah dan tidak ada proteksi harga dari pemerintah untuk menaikkan harga panen kedelai petani, pada akhirnya akan membuat posisi tawar petani semakin lemah. Hal ini senada sama dengan nilai PC pada wilayah Primatani (0,696), namun masih lebih berdampak dari pada wilayah sentra.

Sedangkan nilai efek transfer yang digunakan adalah nilai *Subsidy Ratio to Producer* (SRP). Rasio ini merupakan perbandingan antara transfer bersih dengan nilai output pada tingkat harga sosial. Nilai SRP untuk petani sentra adalah -0,175 yang berarti bahwa kebijakan pemerintah dalam usahatani kedelai tidak dapat memberikan dampak positif, dan berdasarkan pada hasil

analisis ternyata kebijakan pemerintah tidak mampu memberikan subsidi pada petani dalam menekan harga atau biaya proses produksi, sehingga keuntungan menjadi lebih rendah dari keuntungan yang seharusnya diterima oleh petani, demikian juga pada wilayah Primatani (SRP = -0,159). Dengan memperhatikan nilai yang lebih rendah di wilayah Primatani berarti ada transfer output yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah sentra.

Berdasarkan pada uraian diatas, kebijakan pemerintah untuk terus meningkatkan produktivitas kedelai persatuan luas dengan segenap peraturan-peraturan yang mengikutinya ternyata dampaknya cukup efektif bila dilihat dari kemampuan petani untuk memproduksi kedelai, sehingga produksi terus meningkat dan pendapatan petani juga meningkat. Kebijakan pemerintah yang harus tetap diperjuangkan adalah kebijakan harga output dan input produksi, karena peningkatan produktivitas tidak akan ada artinya jika tidak diimbangi dengan peningkatan harga jual produk, penekanan harga input produksi yang akan berpengaruh pada peningkatan keuntungan petani baik keuntungan privat maupun keuntungan sosialnya. Dengan demikian keuntungan privat dan keuntungan sosial yang diperoleh petani dapat diindikasikan sebagai dampak kebijakan pemerintah yang efektif pada peningkatan produksi dan pendapatan petani kedelai.

C. Skenario Kebijakan

Guna memprediksi daya saing dan berbagai kebijakan dimasa akan datang diperlukan adanya skenario kebijakan, dalam analisis ini dilakukan skenario dengan kenaikan tarif impor kedelai sebesar 10 persen, penurunan tarif impor produksi kedelai 5 persen, kenaikan nilai tukar rupiah 10 persen dan penurunan nilai tukar rupiah 5 persen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Hasil Skenario Kebijakan Pemerintah Dengan Kenaikan Tarif Impor 10 Persen dan Penurunan Tarif 5 Persen Terhadap Usahatani Kedelai di Wilayah Primatani dan Sentra Produksi Tahun 2008.

Rasio	Skenario	Wilayah Primatani		Wilayah Sentra	
		Awal	Perubahan	Nilai	Perubahan
PCR [C/(A-B)]	Tarif impor naik 10%	0,574	0,519	0,674	0,608
	Tarif impor turun 5%		0,607		0,703
DRC[G/(E-F)]	Tarif impor naik 10%	0,438	0,607	0,512	0,512
	Tarif impor turun 5%		0,432		0,505
NPCO [A/E]	Tarif impor naik 10%	0,920	1,011	0,908	0,998
	Tarif impor turun 5%		0,873		0,862
NPCI [B/F]	Tarif impor naik 10%	0,948	1,191	0,880	0,880
	Tarif impor turun 5%		1,191		0,880
EPC [(A-B)/(E-F)]	Tarif impor naik 10%	0,918	1.000	0,910	1,010
	Tarif impor turun 5%		0.855		0,861
PC [D/H]	Tarif impor naik 10%	0,696	0.847	0,608	0,811
	Tarif impor turun 5%		0.591		0,516
SRP [L/E]	Tarif impor naik 10%	-0,159	-0.082	-0,175	-0,084
	Tarif impor turun 5%		-0.220		-0,219

Sumber: data primer diolah 2009.

a. Kenaikan Tarif Impor Kedelai 10 persen dan Penurunan 5 persen

Berdasarkan hasil analisis menyatakan bahwa usahatani kedelai di dua wilayah masih dapat memberikan nilai keuntungan yang positif baik secara privat maupun secara ekonomi pada kondisi adanya kenaikan tarif impor sebesar 10 persen. Akibat dari kenaikan tarif impor sebesar 10 persen ini, ternyata perolehan keuntungan privat petani wilayah sentra meningkat dari Rp.1.376,29/kg menjadi Rp. 1.838,02 per kg atau sebesar 25,13 persen. Sedangkan pada wilayah Primatani perolehan keuntungan privat petani meningkat dari Rp.1.849,92 per kg sebelum kenaikan tarif impor menjadi Rp. 2.307,29 per kg setelah kenaikan tarif impor atau sebesar 19,90 persen.. Sedangkan keuntungan sosial petani sebelum kenaikan tarif impor 10 persen adalah Rp. 2.665,05 menjadi 1.253,29 yang berarti terjadi penurunan tingkat keuntungan sosial petani sebesar 47,02. Hal ini berarti bahwa dengan kebijakan kenaikan tarif impor yang dilakukan oleh pemerintah sebesar 10 persen memberikan dampak positif dengan meningkatnya perolehan keuntungan petani baik secara privat maupun sosial sekitar 33,08 persen.

Berdasarkan dampak kebijakan kenaikan tarif impor 10 persen pada Tabel 3.

ternyata, nilai PCR dan DRC usahatani kedelai di wilayah sentra masih dibawah 1 yaitu 0,608 dan 0,512 yang berarti masih berpeluang untuk diusahakan karena mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif, sehingga kebijakan pemerintah dalam hal menaikkan tarif impor mempunyai dampak positif untuk pengembangan usahatani kedelai pada masa yang akan datang. Dampak lain dari akibat kenaikan tarif impor 10 persen adalah nilai NPCO dan NPCI yaitu 0,998 dan 0,880 yang berarti bahwa kebijakan pemerintah tidak dapat memberikan dampak positif pada harga output yang diukur pada harga privat dan sosial, dampak positif terjadi pada harga input selama harga kebutuhan yang lain tetap. Nilai koefisien proteksi efektif (EPC) pada usahatani sebagai akibat dari kenaikan tarif impor menjadi 10 persen adalah 1,01 (yang sebelumnya 0,908) yang berarti bahwa secara umum kebijakan pemerintah dalam hal proteksi terhadap input (subsidi) dan output (tarif) produksi kedelai berdampak positif. Dilihat dari nilai keuntungan dan subsidi untuk produsen dalam hal ini petani kedelai, kebijakan kenaikan tarif impor 10 persen tidak berdampak positif pada produksi dan pendapatan petani kedelai di wilayah sentra.

Apabila dicermati untuk wilayah sentra dengan kebijakan kenaikan tarif impor 10 persen belum memberikan dampak yang bagus karena kebijakan tersebut masih belum beranjak dari kebijakan yang telah dilakukan dengan bukti nilai NPCO dan NCI masih dibawah nilai satu. Hal ini didukung oleh nilai EPC sebesar 1,010 atau 10,% persen kebijakan meningkat harga input dan output. Untuk proteksi output memberikan harga output lebih murah dari harga dunia demikian juga untuk harga input, namun kebijakan tersebut tidak seefektif apabila dibandingkan dengan wilayah Primatani.

Dilihat dari nilai koefisien keuntungan (PC) ternyata nilainya 0,847 untuk Primatani yang berarti bahwa koefisien keuntungan privat lebih kecil dari keuntungan sosialnya, namun apabila dibandingkan dengan nilai PC wilayah Sentra (0,811) lebih baik, karena keuntungan privat lebih tinggi 1,5 persen dari wilayah Sentra. Hal ini seperti yang terjelaskan bahwa kebijakan pemerintah dengan tarif import kedelai mengakibatkan keunggulan kompetitif lebih baik, dilain pihak semakin tidak mempunyai keunggulan komparatif, hal ini didukung karena unsur kebijakan yang merupakan intervensi pemerintah yang mengakibatkan keuntungan atau proteksi berdampak positif terhadap petani secara privat. Namun melihat nilai SRP atau individu dan juga didukung oleh nilai Subsidi untuk produsen (SRP) petani kedelai sebesar -0.082, yang berarti kebijakan pemerintah berdampak positif 8,2 persen dalam meningkatkan usaha agribisnis kedelai. Namun apabila dibandingkan dengan pasar internasional maka keberadaan kebijakan tersebut akan mengakibatkan menghambat terjadi keunggulan komparatif yang seharusnya menjadi kekuatan suatu negara terhadap agribisnis kedelai.

Berdasarkan pada Tabel 3 ternyata nilai PCR 0,703 dan nilai DRC 0,505 artinya bahwa usahatani kedelai masih layak dan menguntungkan untuk diusahakan sebagai akibat dari penurunan tarif impor 5 persen karena masih mempunyai nilai keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif, namun keunggulan komparatif akan meningkat sedangkan keunggulan kompetitifnya menurun.

Dampak kebijakan pemerintah terhadap penurunan tarif impor 5 persen ini juga akan dirasakan akibatnya pada pendapatan dan keuntungan petani kedelai di wilayah Primatani. Nilai koefisien keuntungan, efisiensi proteksi dan nilai subsidi untuk produsen dalam hal ini petani kedelai adalah negatif yang berarti bahwa dengan kebijakan pemerintah tentang penurunan tarif impor 5 persen tidak memberikan dampak yang positif untuk petani dalam berusaha kedelai. Dengan demikian, penanganan faktor internal dan eksternal yang berpengaruh dapat dikendalikan untuk meningkatkan produktivitas kedelai petani, oleh karena itu yang dapat dilakukan dengan memperbaiki kebijakan dibidang tranfer input (sarana produksi berupa benih, pupuk dan pestisida) melalui subsidi harga yang tepat sasaran, transfer output (harga jual) dan perbaikan infra struktur lainnya yang tepat pada sasaran dan kegunaannya.

Untuk mewujudkan swasembada kedelai dan untuk meningkatkan taraf hidup petani kedelai, maka pemerintah melalui Departemen Pertanian menjalankan suatu program rintisan untuk proses percepatan teknologi pada masyarakat melalui program Primatani. Program ini merupakan sebuah program agribisnis pedesaan yang melakukan kerjasama dan aksi nyata dilapang antara petani, penyuluh, aparat pemerintah dan stakeholder. Dengan program primatani ini, petani dipacu untuk mengelola pertanian kedelai dengan cara yang lebih maju dan lebih efisien dalam memanfaatkan sumberdaya alam, berbasis pasar dan agribisnis modern sehingga produktivitas kedelai meningkat dan pendapatan petani meningkat juga.

b. Kenaikan Nilai Tukar Rupiah 10 persen dan Penurunan Nilai Tukar 5 persen

Dampak positif dari kenaikan nilai tukar rupiah 10 persen adalah pada harga output produksi dengan nilai 1,004 yang berarti bahwa kenaikan nilai tukar rupiah akan berdampak pada peningkatan nilai jual produk domestik. Demikian halnya pada input produksi terdapat dampak yang positif dengan nilai 0,915. Hal ini dapat terjadi karena jika nilai tukar rupiah naik 10 persen

maka produk domestik akan meningkat harga jualnya. Dampak lain juga akan dirasakan akibatnya pada pendapatan dan keuntungan petani kedelai di Curahlele. Nilai koefisien keuntungan dan nilai subsidi untuk produsen adalah negatif yang berarti bahwa dengan kebijakan pemerintah tentang kenaikan nilai tukar rupiah 10 persen tidak memberikan dampak yang positif untuk petani dalam berusaha kedelai. Dilain pihak, nilai koefisien proteksi efektif bernilai 1,013 yang berarti bahwa kebijakan proteksi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat dari kenaikan nilai tukar rupiah 10 persen berdampak positif terhadap usahatani kedelai di Curahlele.

Dampak kebijakan pemerintah terhadap penurunan nilai tukar rupiah 5 persen ini juga akan dirasakan akibatnya pada pendapatan dan keuntungan petani kedelai di wilayah Sentra. Nilai koefisien keuntungan, koefisien proteksi efektif dan nilai subsidi untuk produsen dalam hal ini petani kedelai adalah negatif yang berarti bahwa dampak kebijakan pemerintah dalam usahatani kedelai sebagai akibat dari penurunan nilai tukar rupiah 5 persen tidak dapat memberikan dampak yang positif untuk petani dalam berusaha kedelai.

Dampak kebijakan pemerintah lainnya adalah pada proteksi nilai input dan output produksi. Koefisien proteksi input produksi yang sebesar 0,880 yang berarti bahwa nilai nominal input produksi menjadi lebih rendah dari sebelumnya, nilai proteksi output produksi tidak terdapat dampak yang positif dengan nilai 0,862 yang berarti bahwa harga jual dari output produksi tersebut menjadi lebih rendah dari sebelum untuk wilayah Sentra, demikian juga untuk wilayah Primatani.

c. Implikasi Kebijakan dan skenario kebijakan

Memperhatikan secara seksama bahasan kebijakan yang sedang berjalan dan skenario kedepan maka dapat diilustrasikan seperti uraian dibawah ini.

Dipandang dari sudut proteksi maka, proteksi yang tinggi dewasa ini seyogyanya ditinjau kembali, mengingat orientasi pasar dunia menuju pasar bebas dengan tingkat tarif yang seminimal mungkin. Untuk Indonesia sebagai negara yang tergabung

dengan WTO dan ikut serta dalam GATT, maka pemilihan kebijakan tarif impor kedelai, seyogyanya mengikuti kepada kesepakatan yang telah diambil, dimana pada masa perdagangan bebas dikawasan ASEAN yaitu AFTA 2003 kebijakan tarif impor kedelai sebesar 5 persen sudah dilakukan dan didasarkan pada keputusan Menteri Keungan RI Nomor 570/KMK-01/1999 tentang perubahan tarif bea masuk atas impor beberapa produk tertentu, termasuk komoditas kedelai yang telah merubah Surat Keputusan Menteri Keungan Nomor 543/KMK-01/1997 dimana ditetapkan mulai 1 Januari 1998 terhadap Importir Umum (IU) dikenakan bea masuk 20 persen. Kesepakatan yang mengatur perdagangan komoditas kedelai adalah tidak boleh melebihi tarif impor 5 persen dari harga kedelai pada tahun 2003 (AFTA 2003). Sehingga cara yang dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan menguatnya kembali rupiah dan persiapan pelaksanaan perdagangan bebas yang lebih luas lagi yaitu GATT Tahun 2020 adalah dengan cara memperbesar skala usahatani kedelai, sehingga bisa mencapai produksi kedelai nasional sebesar 2,93 juta ton per tahun seperti yang dicanangkan oleh pemerintah. Sehingga kesimpulan yang dapat disarikan dari hasil analisis kepekaan akibat perubahan biaya masuk akan menunjukkan keunggulan kompetitif semakin membaik.

Perubahan produktivitas sangat berpengaruh terhadap perubahan keunggulan komparatif dan kompetitif, hal ini terbukti dengan penurunan produktivitas akan terjadi penurunan daya saing. Lain halnya apabila terjadi kenaikan produktivitas akan menyebabkan daya saing komoditas kedelai semakin mantap terbukti koefisiennya dibawah 0,5. Menurut Porter nilai ini merupakan koefisien yang sangat ideal, pernyataan ini didukung oleh pendapat D'Aveni, 1994, yang menyatakan bahwa komoditas pertanian mempunyai kekuatan daya saing secara berkelanjutan apabila komoditas itu dapat digunakan untuk olahan berikutnya dan adanya masukan teknologi secara terus menerus. Kenyataan ini terjadi pada komoditas kedelai yang diolah menjadi industri tempe, tahu dan program Primatani dikarenakan sumberdaya yang dipakai dapat diperbaharui.

Peningkatan produktivitas sebesar itu nampaknya mungkin dilakukan melalui upaya perbaikan *manajerial skill* dan atau Program Primatani dan pada kondisi teknologi yang berkembang. Pertimbangan ini cukup beralasan mengingat produktivitas kedelai dilokasi penelitian masih bisa ditingkatkan dan menunjukkan potensi teknologi yang ada sekarang masih memungkinkan untuk dikembangkan melalui perbaikan alokasi masukan dan pembaharuan tatalaksana budidaya. Di sisi lain perlu kewaspadaan bahwa keunggulan komparatif dan daya saing kedelai yang telah dicapai selama ini ternyata sangat rentan terhadap perubahan penurunan tingkat produktivitas. Jika terjadi penurunan produktivitas lebih dari 5 sampai 10 persen, perusahaan kedelai akan mendekati tidak mempunyai daya saing dan keunggulan komparatif untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Melihat kondisi di atas maka, salah satu strategi agar supaya daya saing komoditas kedelai semakin meningkat adalah dengan meningkatkan tingkat produktivitas, disamping itu upaya lain yang perlu diperhatikan adalah peningkatan stabilitas hasil, penekanan senjang hasil dan kehilangan hasil saat panen dan pengolahan hasil. Ketiga hal tersebut akan memiliki respon jangka pendek yang nyata apabila ditangani secara baik. Pemberantasan hama penyakit, perbaikan manajemen usahatani, dan perbaikan penanganan panen memiliki potensi dan peluang peningkatan produksi yang cukup besar. Program penyuluhan dan pengembangan perlu diarahkan kepada ketiga aspek ini, untuk memperbaiki kinerja ekonomi dan daya saing komoditas kedelai, hal ini didukung oleh pendapat Sudaryanto *et al*, 2001.

Selain skenario di atas, keunggulan komparatif dan kompetitif dipengaruhi oleh tarif biaya masuk kedelai impor. Hasil analisis menyatakan bahwa dengan tarif masuk kedelai impor ada kenaikan sebesar 10 persen seperti yang akan diberlakukan oleh pemerintah memberikan hasil yang cukup baik yaitu keunggulan. Namun kondisi ini akan tidak dapat bersaing apabila kedelai impor disubsidi oleh negara asalnya (USA), maka yang terjadi adalah perdagangan internasional yang tidak *fair*.

Harga kedelai impor menjadi murah karena negara produsen kedelai memberikan subsidi produksi dan subsidi ekspor.

Apabila dilihat perlindungan pemerintah AS yang sangat ketat terhadap produknya, membuat kedelai impor dari AS menyerbu, dan harga kedelai lokal tidak mampu bersaing dengan harga kedelai AS. Perlindungan tersebut dapat diperhatikan dalam pemberian skim kredit ekspor melalui fasilitas GSM 102 dari USDA (*United State Departement of Agriculture Departemen Pertanian AS*) pada tahun 2001 sebesar 750 juta Dollar AS kepada Importir Indonesia yang mengimpor kedelai dari AS (Kompas, 02/02, 2003). Skim kredit ini sebenarnya adalah subsidi ekspor, yang membuat impor kedelai dari AS menjadi sangat murah.

Apabila dilihat dari perdagangan dunia kendali untuk komoditas kedelai berada pada AS dengan 70 persen menguasai pasar dunia. Oleh sebab itu perubahan penawaran dari AS akan sangat menentukan harga kedelai di pasar dunia. Di sisi lain, Indonesia dalam pasar kedelai dunia sangat kecil yaitu pengimpor nomer 12 dengan porsi yang hanya 2,18 persen dari volume perdagangan kedelai dunia. Dengan posisi yang sangat kecil ini perubahan kebijakan impor yang ditetapkan oleh Indonesia tidak akan berpengaruh terhadap harga keseimbangan pasar kedelai dunia. Dengan demikian apabila pemerintah ingin menetapkan kebijakan pengurangan impor kedelai untuk menggairahkan produksi dalam negeri, tidak akan berdampak terhadap keseimbangan pasar dunia. Akan tetapi, akan berpengaruh sangat berarti terhadap keragaman ekonomi kedelai di dalam negeri.

Sementara itu, perubahan kebijakan yang dilakukan negara pengekspor akan berdampak signifikan terhadap keadaan ekonomi perkedelaian di Indonesia. Untuk itu, antisipasi kebijakan nasional seandainya dibuat untuk menghadapi setiap perubahan kebijakan negara pengekspor. Peran AS yang sangat besar terhadap pangsa impor kedelai mengharuskan menerapkan proteksi sekitar 25 persen sampai 40 persen agar supaya kedelai domestik dapat bersaing dengan adanya perubahan kebijakan negara pengekspor. Selain itu diharapkan Indonesia dapat melakukan penghematan pengeluaran

devisa dengan memilih impor kedelai dari negara yang biaya transportasinya terendah. Sementara untuk meningkatkan permintaan terhadap kedelai lokal, pemerintah dapat menerapkan kebijakan tarif bea masuk impor kedelai. Seperti yang diutarakan oleh Rina, 2002, bahwa peningkatan tarif impor kedelai dengan beberapa simulasi tidak akan terlalu berpengaruh terhadap fluktuasi harga kedelai di pasar domestik (hasil tahun ke dua)

Kebijakan protektif yang mungkin dilakukan oleh pemerintah menyebabkan usahatani kedelai menguntungkan secara finansial, namun secara ekonomi adalah kurang kompetitif dibandingkan dengan impor dan pengembangan komoditas lainnya. Pelaksanaan pasar bebas akan berdampak positif terhadap konsumen, tetapi merupakan disinsentif bagi produsen, dan impor kedelai meningkat secara nyata. Kebijakan penghapusan subsidi sarana produksi (pupuk dan pestisida) dapat dipandang sebagai keputusan yang rasional secara teknis dan ekonomis, namun tetap harus diimbangi dengan kebijakan proteksi harga (tarif impor) untuk tetap mendorong adopsi teknologi dan peningkatan produktivitas. Disamping itu kebijakan insentif non harga tetap diperlukan seperti penyuluhan, penciptaan teknologi baru, pengembangan infrastruktur (fisik dan kelembagaan) untuk mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, apabila ditinjau dari beberapa negara-negara lain melakukan proteksi terhadap petani kedelai dengan berbagai cara, dengan penetapan tarif impor atau penetapan kuota impor. Jepang misalnya, meski menetapkan bea masuk kedelai nol persen, tetapi mensyaratkan aturan karantina yang ketat melalui *Plant Quarantine Law* dan *Food Sanitation Law*. AS sendiri menetapkan tarif impor 4,4 sen per kilogram. Cina menetapkan *ceiling binding* 180 persen.

Kanada menetapkan tarif khusus. Korea Selatan menetapkan memberlakukan kuota dengan tarif 503.2988 won per kilogram. Cile dengan *advalorem tariff* sebesar delapan persen, Papua New Guinea dengan tarif masuk kedelai sebesar 11 persen dan Thailand menetapkan kuota secara transparan. Peluang untuk menetapkan tarif impor untuk Indonesia terbuka, bila tarif masuk ditetapkan nol persen, maka sebenarnya pemerintah mempunyai kesempatan untuk memberlakukan tarif bea masuk sebesar 25 persen sampai dengan 40 persen agar supaya kedelai domestik mempunyai daya saing yang absolut dan dapat melindungi produsen dalam negeri dari persaingan pasar yang tidak "fair".

d. Keterkaitan Hulu Dan Hilir Aktivitas Sistem Agribisnis Kedelai

Untuk mengetahui prospek pengembangan komoditas kedelai di Jawa Timur (khususnya di wilayah penelitian) digunakan Analisis Medan Kekuatan (*Force Field Analysis*) untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung (*Driving Force Factor*) yang dapat berupa kekuatan (*Strength*) maupun peluang (*Opportunity*) dan faktor yang menghambat (*Restraining Force Factor*) yang terdiri dari kelemahan (*Weaknesses*) maupun kendala (*Threaty*), sehingga dapat ditentukan tindakan apa yang dapat dilakukan guna memecahkan persoalan-persoalan yang ada.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat sehingga terdapat isu-isu strategis yang kemudian diperoleh beberapa permasalahan untuk dicari solusi yang tepat. Faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut terlebih dahulu dipisahkan menjadi beberapa aspek penting, yaitu aspek sarana produksi, aspek budidaya, aspek pengolahan, dan aspek pemasaran, hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Driving Force Factor Komoditas diwilayah Penelitian

Aspek	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1. Sarana Produksi	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat penerapan alsintan pasca panen • Terdapat teknologi produksi, prosesing, dan penyimpanan benih kedelai • Produksi benih kedelai melalui sistem Jabalsim 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan alsintan memerlukan biaya yang relatif mahal • Petani kesulitan dalam memperoleh pupuk • penyediaan benih kedelai belum memperhatikan mutu dan keseraagaman
2. Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> • Jember merupakan daerah yang berpotensi dalam pengembangan komoditas kedelai • Pengendalian hama dan penyakit berdasarkan pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman kedelai rentan terhadap serangan hama dan penyakit • Biaya perawatan kedelai mahal • Kurangnya pengetahuan petani dalam menanggulangi serangan hama dan penyakit
3. Pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kedelai dapat diolah menjadi berbagai produk olahan • Terdapat berbagai macam industri pengolahan kedelai 	<ul style="list-style-type: none"> • Rentan terhadap ketidakstabilan pasokan bahan baku
4. Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat saluran pemasaran (tataniaga) kedelai 	<ul style="list-style-type: none"> • Kenaikan harga bahan baku • Terbatasnya informasi pasar bagi petani • Persaingan harga dengan kedelai impor

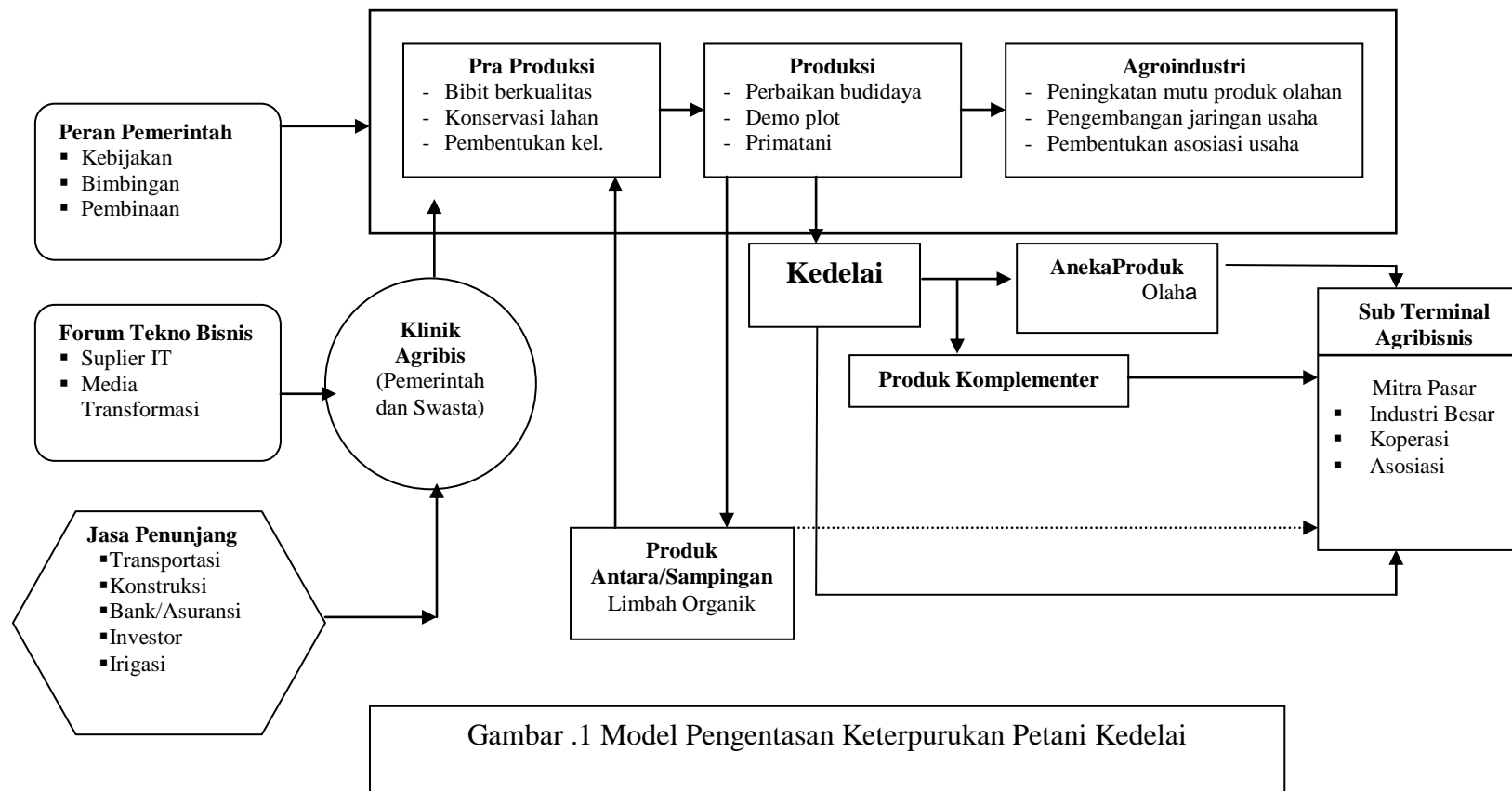
Setelah memperhatikan secara seksama Tabel 4, maka dilanjutkan dengan Tabel 5 yang berupa beberapa solusi dan

aktivitas untuk mendukung pengentasan keterpurukan petani kedelai di wilayah penelitian.

Tabel 5. Solusi dan Aktivitas Hasil Analisis Medan Kekuatan

SOLUSI		AKTIVITAS	
1.	Menerapkan pengendalian hama dan penyakit secara hayati	1.	a. Pengenalan pestisida hayati oleh petugas PPL kepada petani b. Mengurangi penggunaan obat-obatan kimiawi
2.	Adanya peran pemerintah dalam mengatasi kelangkaan pupuk	2.	Memberikan pupuk bersubsidi terhadap petani
3.	Mengembangkan teknologi budidaya yang tepat guna dan terjangkau oleh petani	3.	Penerapan Program Primatani di beberapa wilayah percontohan
4.	Pembinaan dan pelatihan terhadap produsen benih	4.	Menyediakan benih yang bermutu dan seragam
5.	Pengelolaan alsintan yang memadai agar pihak penjual dan petani pengguna mendapatkan keuntungan yang wajar	5.	Pemantauan oleh pemerintah dalam penjualan alsintan
6.	Penanganan serangan hama dan penyakit secara intensif	6.	SLPHT di tingkatkan melalui Primatani
7.	Adanya pengetahuan petani tentang cara menanggulangi hama dan penyakit	7.	a. Pemberian informasi dalam menanggulangi hama dan penyakit oleh penyuluh b. Mengikuti petunjuk pemakaian dalam pemberian dosis obat
8.	Perlu adanya peran pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan baku	8.	Menerapkan budidaya kedelai secara luas di daerah yang potensial
9.	Perlu adanya peran pemerintah dalam menstabilkan harga kedelai terutama kedelai impor	9.	Memberikan subsidi kepada industri pengolahan kedelai terutama tahu dan tempe
10.	Perlu adanya keterlibatan pemerintah dalam pemasaran kedelai	10.	Pemberian informasi pasar terhadap petani
11.	Perlu adanya peran pemerintah dalam memantau harga kedelai di pasaran	11.	a. Menjalin hubungan kerjasama antara petani dengan industri pengolahan kedelai b. Memberikan tarif terhadap kedelai impor

Berdasarkan analisis FFA maka model pengembangan agribisnis kedelai ke depan seperti pada terjelaskan pada Gambar 1.



Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Profitabilitas privat dan profitabilitas sosial usahatani kedelai di wilayah penelitian memiliki efisiensi dan memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang dapat diartikan usahatani kedelai mempunyai daya saing.
2. Kebijakan pemerintah terhadap *output tradable* memberikan dampak negatif pada usahatani kedelai yang ditunjukkan dengan nilai NPCO lebih kecil dari satu. Kebijakan pemerintah terhadap *input tradable* memberikan dampak positif pada usahatani kedelai yang ditunjukkan dengan nilai NPCI lebih kecil dari satu. Secara bersama-sama kebijakan pemerintah terhadap *input output tradable* dan *input non tradable* memberikan dampak negatif terhadap usahatani kedelai yang ditunjukkan dengan nilai NPT dan SRP yang negatif dan nilai PC yang lebih kecil dari satu.
3. Perubahan kebijakan pemerintah terhadap tarif impor kedelai dan nilai tukar rupiah tetap mempunyai dampak yang positif terhadap efisiensi dan daya saing usahatani kedelai, sedangkan perubahan kebijakan pemerintah terhadap *output tradable* tetap berdampak negatif pada usahatani kedelai. Perubahan kebijakan pemerintah terhadap *input tradable* tetap memberikan dampak positif pada usahatani kedelai. Secara bersama-sama perubahan kebijakan pemerintah terhadap *input output tradable* dan *input non tradable* tetap memberikan dampak negatif, sedangkan dampak perubahan kebijakan pemerintah terhadap *input* dan *output tradable* secara bersama-sama tetap memberikan dampak yang positif pada usahatani.
4. Usahatani kedelai dengan program Primatani mempunyai daya saing lebih kuat dibandingkan dengan non primatani walau berada di wilayah sentra.

5. Dalam mengatasi keterpurukan petani kedelai dilakukan upaya berdasarkan analisis FFA dari sub sistem hulu sampai dengan hilir yaitu :
 - a. Sub-sistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*) (1) meningkatkan penyuluhan di bidang Iptek; (2) pengembangan bibit unggul serta (3) pembenahan saluran distribusi saprodi.
 - b. Sub-sistem usahatani (*on-farm agribusiness*) pengembangan pupuk organik dan pembinaan oleh instansi terkait (Disperta) secara intensif terutama pemberantasan hama dan penyakit
 - c. Sub-sistem pengolahan (*down-stream agribusiness*) diperlukan *asosiasi petani dan agroindustri kedelai* dan mengembangkan industri pengolahan modern seperti industri kecap dan susu kedelai.
 - d. Sub-sistem pemasaran perlu dilakukan penataan pasar yang terkait dengan pasar induk agribisnis.
 - e. Sub-sistem jasa pendukung diperlukan pengembangan pasar di tingkat desa, pengembangan klinik agribisnis dan pengoptimalan penyuluhan juga menjadi syarat keharusan.

b. Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini antara lain adalah:

1. Pemerintah harus memberlakukan tarif impor kedelai yang lebih fleksibel yaitu tarif impor kedelai dapat dinaikkan pada saat harga kedelai dunia murah dan nilai tukar rupiah menguat, dan tarif impor kedelai dapat juga diturunkan pada saat harga kedelai dunia sangat mahal dan nilai tukar rupiah melemah.
2. Pemerintah diharapkan mampu menguatkan dan menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama US Dollar dimana menguatnya nilai tukar rupiah akan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing usahatani kedelai serta agroindustri dengan semakin terjangkaunya harga input usahatani yang diimpor.

Daftar Pustaka

- Arifin, Bustanil, 1994, *Pangan Dalam Orde Baru*, Kofindo, Jakarta.
- Baharsyah, Syarifudin, 1989, *Strategi Pembangunan Pertanian Menyongsong Era Tenggala Landas*, Departemen Pertanian, Jakarta
- Bardsley dan Haris, 1987, *An Approach to The econometric Estimation of Attitudes To Risk in agriculture*, Australian Journal of agriculture Economics, Vol 13 No. 21 : 112-126
- Bruno.M, 1972, *Domestic Resource Cost and Effektiv Protection: Clarification and syntesis*. Journal of Political Economy
- Cho, Dong Sung, 1994, *From Adam smith to Michael Porter (Evolusi Teori Daya Saing)*, Salemba Empat, Jakarta
- Departemen Pertanian, 2008. *Agibisnis Kedelai*. Jakarta: Puslitbang Deptan.
- Effi, Damayanti, 1992, *Studi Tentang Perilaku Petani terhadap Resiko Serta Hubungannya dengan Pengambilan Kredit Pada Usahatani Kedelai*, Tesis pada Fakultas Pasca Sarjana KPK UGM- Universitas Brawijaya.
- Heriato, Zulham dan SW Suhartini, 1993, *Local Comparative Advantage of Soybean Production: Case from East Java CGPRT Center and CASER Bogor*.
- M. Nasir, 1989, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mubyarto, 1991, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, LP3ES, Jakarta.
- Monke, Eric A dan Scott R Person, 1989, *The Policy Analisis Matrix. A manual for Practitioner*, Office of Policy Development and Program Review Burau for Program and Policy Coordination U.S Agency for International Development. Washington DC
- Monke, Eric A dan Scott R Person, 1989, *The Policy Analisis Matrix for Agricultural Development*, Cornel University Press.
- Purwanto, Adreng, 1990, *Analisa Biaya dan Keuntungan Industri Tahu dan Tempe di Lampung dan Jawa Barat*, Pusat Penelitian Agro Ekonomi Badan Penelitian dan Pengembangan Penelitian, Bogor.
- Porter, M.E, 2000, *Keunggulan Bersaing*, Terjemahan, Binapura Aksara, Jakarta
- Rusmadi, 1992, *Efisiensi Relatif dan Pengaruh Sikap Petani terhadap Resiko dalam Upaya Pengembangan Komoditas Kedelai*, Tesis pada Fakultas Pasca Sarjana KPK UGM- Universitas Brawijaya
- Rusastra, 1992, *Telaah Aspek Produksi dan Pemasaran Kedelai di Jawa Timur*, Forum Penelitian Agro ekonomi. Vol 9 No 2 dan Vol 10 No 1, Juli 1992, PSE, Bogor
- Roumasset, J.A, 1979, *Intruduction and State of the Art. Dalam Roummaset, J.A . JM Boussard and I Sing (Ed) p. 14-20. Risk Uncertainty and Agricultural Development*. Agricultural Development Council. New York.
- Rosegrant, et al, 1977, *Output Rspone ti Price and Public Investment in Agriculture: Indonesian Food Crops*. Journal of Development Economics Voil 55(1997) Elsiwier Holland
- Semaoen, Iksan, 2001, *Kebijakan Pembangunan Pertanian Jawa Timur*, Makalah disampaikan pada Seminar di Kamar Dagang dan Industri Daerah Propinsi Jawa Timur, Tgl 1 Maret 2001, Surabaya

- Simanjutak, 1990, *Analisis Resiko Produksi dan Efisiensi Alokasi Sumberdaya Dalam Usaha Pengembangan Budidaya Tambak di Kotamadya Surabaya Jawa Timur*, Tesis Pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang.
- Simatupang, Panjar, 2004. *Primatani Sebagai Langkah Awal Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis Industrial*. Jurnal AKP Volume 2 No.3 September 2004: 209-225.
- Soekartawi, 1993, *Resiko dan Ketidakpastian Dalam Agribisnis*, Teori dan Aplikasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soetriono, 1995, *Peranan Sektor Basis Dalam Mendukung Agroindustri di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Jawa Timur*, Thesis Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung (tidak dipublikasikan)
- Soetriono, 2001, *Studi Kebijakan Pertanian Terhadap Komoditas Tebu Guna Mendukung Agribisnis*, Jurnal Agribisnis, Volume IV, No 2 dan Volume V, No 1, JUBC, Jember
- Soetriono dkk, 2003, *Studi Potensi dan Peluang Usaha Agroindustri dan Agribisnis di JLS Kabupaten Banyuwangi*, Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Soetriono, 2004. *Analisis Daya Saing Komoditas Kedelai di Sentra Produksi Guna Menunjang Pengembangan Agroindustri*. Jurnal Agro Ekonomi Vol 11 No 2 Desember 2004. UGM. Yogyakarta
- Soetriono, 2006, *Daya Saing Pertanian Dalam Tinjauan Analisis*, Bayu Media, Malang.
- Soetriono, 2007, *Strategi Pengentasan Keterpurukan Petani Kedelai Melalui Rancang Bangun Hulu Hilir, Pemodelan dan Kebijakan Pemerintah*, Laporan Penelitian Tahun ke-1, Lembaga Penelitian Universitas Jember, Tidak di Publikasikan, Jember.
- Soetriono, 2008, *Strategi Pengentasan Keterpurukan Petani Kedelai Melalui Rancang Bangun Hulu Hilir, Pemodelan dan Kebijakan Pemerintah*, Laporan Penelitian Tahun ke- 2, Lembaga Penelitian Universitas Jember, Tidak di Publikasikan, Jember.